

ABSTRAK

Pengangkutan udara merupakan salah satu cara untuk mengangkut penumpang ataupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan pesawat udara. Dalam pelaksanaan pengangkutan udara, hak-hak dari penumpang sebagai konsumen sering tidak terpenuhi seperti adanya keterlambatan penerbangan. Pada peraturan terkait penerbangan apabila alasan terjadinya keterlambatan penerbangan tidak termasuk dalam faktor cuaca dan teknis operasional, maka pengangkut sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atau ganti kerugian. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dalam peraturan yang ada disebutkan bahwa yang mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian adalah penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan lebih dari 30 menit, sedangkan untuk konsumen yang mengalami keterlambatan penerbangan kurang dari 30 menit tidak diatur. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan kriteria kerugian adanya keterlambatan penerbangan pada konsumen pengguna jasa pengangkutan udara dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen akibat adanya keterlambatan penerbangan pada jasa penerbangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak diaturnya keterlambatan penerbangan kurang dari 30 menit dapat memberikan peluang kepada pengangkut sebagai pelaku usaha untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Kemudian upaya hukum yang dapat ditempuh penumpang apabila terjadi keterlambatan penerbangan adalah penyelesaian secara non-litigasi melalui BPSK atau melalui jalur litigasi.

Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen jasa pengangkutan udara, keterlambatan penerbangan

ABSTRACT

Air freight is one way to transport passengers or goods from one place to another by using the aircraft. In the implementation of air transport, the rights of passengers as consumers are often not met as any flight delays. In related regulations if the reason for the delay cost flights are not included in the technical and operational weather factors, the carrier as the business must be responsible to provide compensation or restitution. It becomes interesting to study because of the existing regulations stated that the gain compensation or indemnity is delayed passenger flights more than 30 minutes, while for consumers who experience flight delays less than 30 minutes is not set. Therefore, this study was conducted to describe the criteria of loss of a delay in the consumer cost of air transport service users and explain the legal remedies that can be taken by the consumer due to flight delays in flight services.

The method used is a normative legal research. The approach taken is a statutory approach.

The results of this study indicate that the regulation of flight delays of less than 30 minutes can provide opportunities for businesses to transport as exempt from responsibility. Then remedies that can be taken in the event of flight delays passengers are non-litigation settlement through BPSK or through litigation.

Keywords: legal protection, consumer air traffic, flight delays